



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PADANG

BERITA ACARA

Nomor : 13/BA/ DPRD-Pdg/2025

RAPAT PANSUS I DPRD KOTA PADANG TENTANG RANPERDA

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA PADANG

TAHUN 2025

Hari	: Selasa
Tanggal	: 15 April 2025
Pukul	: 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat	: Ruang Komisi III DPRD Kota Padang
Acara	: Rapat Pansus I DPRD Kota Padang terhadap Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Padang Tahun 2025

I. PESERTA RAPAT.

- | | |
|-------------------|---|
| A. Pimpinan Rapat | : Helmi Moesim, S.IP (ketua Pansus I) |
| B. Notulis | : Sekretariat Pansus I |
| C. Sifat | : Terbuka. |
| D. Peserta Rapat | : <ol style="list-style-type: none">1. Osman Ayub2. Helmi Moesim, S.IP3. Arnedi Yarmen, S.Pd4. Wahyu Hidayat5. Rachmad Wijaya6. Argi Putra Finalo7. Alfi Beben One8. Rafli Boy9. Mukhlis, SE10. Usmardi Thareb11. Dr. H. Hendrizal, S.Sos.I.M.Pd11. Miswar Jambak, SH12. Christian Rudy Kurniawan Sutiono |
| E. SKPD | : <ol style="list-style-type: none">1. Raju Minropa Kepala BPKAD2. Ayu Ciyanthia, SH.MH |

E. OPD	:	1. Raju Minropa Kepala DPKAD 2. Ayu Ciyanthia, SH.MH Bagian Hukum
F. Stekholder	:	1. Irfan Amran Ketua Kadin 2. M.Yazid Ketua LPM Kec.Pdg Timur 3. Hendratmo, SH sekretarias Karang Taruna Kota Padang
E. Sekretariat	:	1. Rizal Febrinal, S.Hut.MM 2. Helzona Lidia Rosi, SH 3. Putri 4. Indra

II. KEGIATAN RAPAT

Rapat dibuka oleh Ketua Pansus I DPRD Kota Padang Bapak Helmi Moesim, S.IP dan didampingi oleh Koordinator Pansus I Bpk Osman Ayub dengan agenda sebagai berikut:

- ❖ Melanjutkan pembahasan Pasal per Pasal Ranperda Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- ❖ Diskusi dan Pembahasan oleh Anggota Pansus I yang dipimpin oleh ketua Pansus I

A. Pembukaan

Ketua Pansus I Helmi Moesim, S.IP

Bismillahirrahim.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak/ Ibu Yth ;

Pertama diucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu yang telah berkenan hadir, Bapak/ibu Anggota Pansus I DPRD Kota Padang, Bpk Raju Kepala BPKAD Kota Padang berserta jajaran dan Ibu Ayu dari Bagian Hukum Setda Kota Padang, Bapak Ketua Kadin Kota Padang , Ketua LSM Kecamatan Padang Timur dan Ketua Karang Taruna Kota Padang serta Bapak/Ibu sekretariat DPRD yang mendampingi dan memfasilitasi kegiatan Pansus I ini.

Sesuai kesepakatan kita kemaren, bahwa hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan pasal per pasal dari Perobahan Ranperda ini.

Tapi sebelumnya kita sudah mengundang Kadin, LSM dan Karang taruna Kota Padang, untuk itu kita minta sedikit pemaparan dan saran beliau-beliau.

B. Pembahasan

Pandangan dan saran Stakeholder

Zalmadi, SH (Ketua Karang Taruna Kota Padang)

Menyampaikan ucapan terima kasih telah mengundang karang taruna Kota Padang pembahasan perubahan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah ini. Kedepannya kita berharap dengan terbitnya Perda Perubahan ini bisa terakomodir apa semua kendala terkait dengan aset.

Pada Paripurna Tanggalsalah satu Ranperda yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Padang adalah Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bagaimana perubahan ini bisa terlaksana dengan baik.

Yasid Ketua LSM Kec. Padang Timur

Menyampaikan terima kasih sudah melibatkan masyarakat dalam penyusunan ranperda ini, aset-aset pemko banyak terbengkalai dan tidak adanya sewa, hal ini cukup disayangkan. Saya berharap aset-aset pemko ini bisa dikelola dengan baik.

Baru ini kami diundang, semoga kedepannya tetap bisa berlanjut.

Kadin Kota Padang

Dengan adanya undangan ini berarti ada keterbukaan kita Bersama dalam penyusunan perda PBMD.

Kami melihat dari sisi Ekonomi, alhamdulillah sudah 5 tahun menjabat Kadin, alerginya investor masuk ke Sumbar ini masalah tanah. Berharap investasi di Kota Padang ini setidaknya tetap menjunjung nilai-nilai adat kita ini, untuk kedepannya kami minta agar bisa mengetahui mana-mana aset pemko yang bisa kita Kelola sehingga bisa ada yang kita kerjasamakan dengan pemko. Saying kalau ada lahan-lahan yang tidur.

Ketua Pansus I Helmi Moesim, S.IP

Terima kasih atas saran dari stakeholder, yang mana ini salah satu bentuk kepedulian kami. Dan mempersilahkan pimpinan dan anggota Pansus untuk memberikan pertanyaan dan masukan.

Anggota Pansus Usmardi Thareb

Sebelum lanjut pasal per pasal,

Kita coba lihat bagian hukum dari niat terbitnya perda ini, Revisi Permendagri Nomor 19 tahun 2016 ke Nomor 7 Tahun 2024. Karena salah satu bagian hukum mempertimbangkan dari Kerjasama pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

- Dapak positif dari Regulasi pusat dengan Daerah
- Makanya dari pada berlama-lama melihat pasal pasal, saya minta Gambaran pesifik dari permendagri ini. Apa keuntungan Daerah dari perobahan permendagri ini, melalui pimpinan.
- saya melihat sinergi antara pemerintah kota dengan DPRD. Dampak yang timbul dari regulasi ini. Saya memancing bagian hukum dapat melihat cangkupan luas tidak satu saja.
- Dalam Perada ini ada 50 pasal yang dirobah. Bagaimana kita pilih pasal yang masuk kearifan lokal

Bagian Hukum Ayu Analisi Perancangan Perundang-undangan

Untuk urgensinya perubahan Perda PBMD ini sebenarnya bagaimana cara kita mendapatkan pemanfaatan atau keuntungan dan kemudahan.

Sekretaris Pansus Wahyu Hidayat

Usulan pak UT ini adalah adil saya mendukung, silahkan pak Raju

Kepala BPKAD Raju

Alasan melakukan perubahan Perda nomor 10 tahun 2017 menjadi perda nomor 4 tahun 2024 dilanjutkan dengan perubahan ini. Banyaknya pasal pasal yang tidak sinkronnya. Maka kami mengusulkan perda ini.

Anggota Pansus Usmardi Thareb

Dengan perubahan Regulasi pusat disingkapi dengan cepat, artinya keseriusan kita mutlak dibutuhkan dalam perubahan perda ini, karena kita yang pertama menagapi regulasi ini.

Sebelum masuk ke pasal/pasal, dari progress ini berapa persen kepentingan daerah, kemudian Inovasi kita. Harus ada poin-poin yang kita masukan kedalam perda ini.

Kalau kita mengadopsi seluruhnya permendagri ini, maka kita tidak perlu lagi dibahas.

Ketua Pansus I Helmi Moesim, S.IP

Bagaimana Kawan-kawan, ada yang perlu kita bahas di pasal konsep ini?

Bagian Hukum Ayu Analisi Perancangan Perundang-undangan

Kita kembalikan ke BPKAD.

Ketua Pansus I Helmi Moesim, S.IP

Untuk memperkaya perda ini secara Teknik dan lain-lain, ketua pansus meminta usulan dari anggota pansus?.

Wakil Ketua Pansus I Arnedi Yarmen, S.Pd

1. Terkait sewa untuk pendapatan misal 5 tahun apa bisa tagihan setiap tahun dan perlu payung hukum
2. Rencana Pembangunan tanah yang sudah dibebaskan seperti Pantai padang, bisa kita berdayakan untuk masyarakat sampai ada regulasi baru, apa ada peluang kita untuk mengatur hal tersebut dalam ranperda ini?

Ketua Pansus I Helmi Moesim, S.IP

Apakah kita lanjutkan masukan-masukan setelah itu baru finalisasi, bagaimana kita awa bahan ini kerumah dulu untuk mempelajari dan memahaminya?

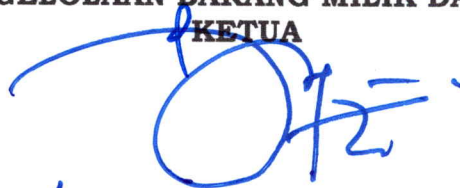
Peserta Rapat

Sepakat untuk dipelajari konsep Ranperda ini

Rapat ditutup oleh Ketua Pansus I Pukul 11.15 WIB.

**PANSUS I DPRD KOTA PADANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

KETUA



1 HELMI MOESIM, S.IP